

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah JJLS di Kabupaten Bantul yaitu Mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan beberapa tahapan, diantaranya adalah: 1) tahapan perencanaan 2) tahapan persiapan 3) tahapan pelaksanaan 4) tahapan penyerahan hasil. Pelaksanaan pengadaan tanah JJLS sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal ini dilihat dari Panitia Pengadaan Tanah yang melaksanakan dengan sesuai prosedur pengadaan tanah dan masyarakat yang setuju dengan pembangunan JJLS di Kabupaten Bantul untuk kepentingan umum yang dapat memberikan peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, pemerataan pembangunan, dan kemudahan untuk akses transportasi darat.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat saran yang dapat diberikan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yang kemudian dapat dijadikan masukan dalam pelaksanaan pengadaan tanah berikutnya. Kepada pihak instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan pendekatan persuasive terhadap masyarakat berupa pemberian informasi-informasi penting terkait dengan

pengadaan tanah, sehingga nantinya warga masyarakat akan lebih memahami tujuan, tata cara, aturan dan prosedur, sehingga juga dapat memudahkan instansi yang memerlukan tanah agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berjalan tepat waktu. Kemudian Dari kasus-kasus pengadaan tanah sebelumnya, penulis menyoroti penggunaan ganti rugi yang didapatkan oleh pihak yang berhak, bahwa dana yang mereka terima tidak digunakan dengan bijak, seperti digunakan untuk membeli mobil baru, barang-barang elektronik baru, hal tersebut memang sudah menjadi hak mereka, akan tetapi alangkah baiknya para pihak yang berhak/warga masyarakat tersebut dapat diberikan sosialisasi terkait dana yang mereka terima. Misalnya untuk membeli hunian, usaha, tanah, agar ganti rugi tersebut dapat bermanfaat dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dalimunthe, C. 2018. *Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-Hak Atas Tanah*. Medan: Yayasan Pencerahan Mandailing.
- Darwin, G. 2015. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gozali, D. S. 2017. *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasni. 2016. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.M. Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnandar, N. Arnowo, H. 2021. *Prinsip & Pelaksanaan Pengadaan Tanah*. Banyumas: SIP Publishing.
- Limbong, B. 2017. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Marghareta Pustaka.
- Santoso, O. 2015. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudjarwo, M. Adi, W. Manopo, P. G. 2015. *Ganti Untung Pengadaan Tanah*. Jakarta: Renebook.
- Sugiharto, S. U. Suratman. Muchsin, N. 2015. *Hukum Pengadaan Tanah: pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum pra dan pasca reformasi*. Malang: Setara Press.
- Sutedi, A. 2020. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, 2020, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Jakad Publishing, Surabaya.
- Wakisto, H. A. 2017. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.

2. Jurnal dan Skripsi

- Edy, H. Pristyawati, T. 2022. *Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan*. Jurnal Media Komunikasi Dunia Ilmu Sipil.
- Ekasetya, M.P. 2015. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Lestari, P. 2020. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Berdasarkan Pancasila*. Sign Jurnal Hukum.
- Nofitasari, T. Prakoso, E. 2016. *Persepsi Masyarakat Kepesisiran Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Terhadap Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Kabupaten Bantul*.
- Pradana, A.K. 2018. *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Qadarisman, A. 2019. *Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Karakteristik Ekonomi Masyarakat Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul*.
- Tanzili, M. 2017. *Asas dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jurnal Varia Hukum.
- Utami, D. T. 2019. *Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Utomo, S. 2020. *Problematika Proses Pengadaan Tanah*. Jurnal Justisia.
3. Website
- Adminuniv, *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria*. <https://fahum.umsu.ac.id/hak-hak-atas-tanah-menurut-hukum-agraria/>,
- Fiska, *Teori Pembangunan: Pengertian Tujuan, dan Konsep Penerapannya*. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-pembangunan/#:~:text=Pembangunan%20dapat%20diartikan%20sebagai%20upaya,menciptakan%20masyarakat%20yang%20lebih%20baik>
4. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebagai Ketentuan Pelaksanaannya.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penulis (Surat Pernyataan Kanwil BPN Yogyakarta)



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Brigjen Katamsa, Yogyakarta (55152) Telepon: (0274) 377747 email: diy@atrbtn.go.id

Nomor : B/UP.04.07/825-34.100/XI/2023 Yogyakarta, 29 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan Ijin Riset

Yth. Shera Melinda (Universitas Atma Jaya
Yogyakarta)
di Tempat

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Nomor 326/ND-34.500.AT.02/XI/2023 tanggal 27 November 2023 hal Ijin Riset, dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang berlokasi di Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tahun 2014-2015. Pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi yang memerlukan tanah.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa
Yogyakarta
Plh. Kepala Bagian Tata Usaha,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Tri Harnanto, S.Sos., M.H.
NIP 197101141997031002

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSRé, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05

Lampiran 2 Dokumentasi Penulis (Jalur Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Bantul 2023)



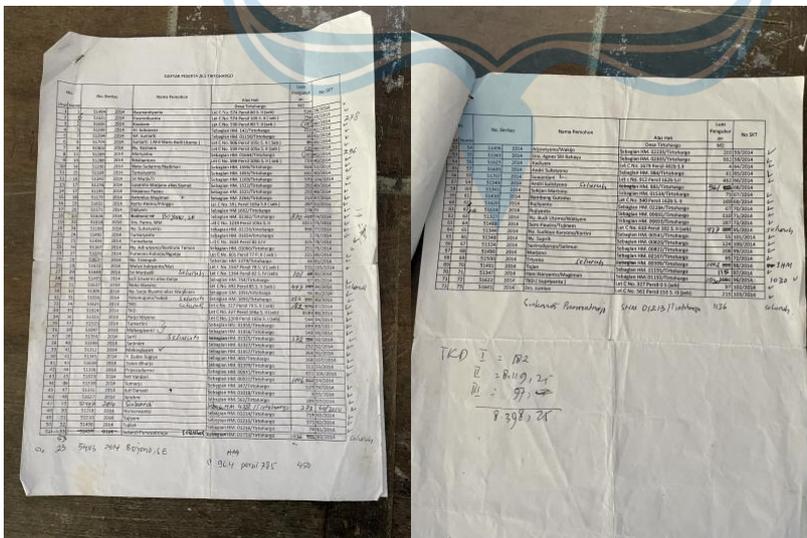
Lampiran 3 Dokumentasi Penulis bersama staf bidang bina marga DPUPESDM Yogyakarta



Lampiran 4 Dokumentasi penulis bersama Kasi Jagabaya Kalurahan Tirtohargo



Lampiran 5 Dokumentasi penulis (daftar pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah)



Lampiran 6 Dokumentasi penulis (daftar panitia pengadaan tanah di Kabupaten Bantul)

